

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan berkembang sangat cepat dalam era globalisasi, terutama dalam penyajian informasi. Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi.

Laporan keuangan yang menyajikan informasi sangat dibutuhkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah sebagai aparat yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola keuangan negara dan rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengelola keuangan negara dan rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya guna mencapai *Good Government Governance*, dicerminkan dengan adanya akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah dalam gambarannya mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Laporan keuangan juga merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Pentingnya laporan keuangan daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas

dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaporan keuangan pemerintah sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, dan (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Fungsi laporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan, posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, perubahan posisi entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan harus mempunyai nilai informasi karena, informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal (Suwardjono, 2005). Laporan keuangan juga harus memiliki kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi

dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun 2012 memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2012 sampai dengan 2015 menunjukkan kualitas yang semakin memburuk. Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang informasi keuangannya tidak dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan semakin banyak, dan sebaliknya, persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang informasi keuangannya dapat diandalkan semakin sedikit. Pemeriksaan Semester II Tahun 2013 difokuskan pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja, selain menyelesaikan pemeriksaan keuangan atas lembaga pemerintah pusat dan daerah. Objek pemeriksaan seluruhnya 683 buah terdiri dari 424 objek PDPT, 59 objek pemeriksaan kinerja dan 200 objek pemeriksaan keuangan.

Buruknya laporan kualitas laporan keuangan daerah ditunjukkan bahwa dari 191 LKPD yang diperiksa, sebanyak 72 LKPD memperoleh opini Tidak Wajar (TW), 110 LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan hanya satu daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain berupa opini, hasil pemeriksaan BPK RI atas 191 LKPD telah menemukan 3.051 kasus senilai Rp. 9,93 triliun terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari jumlah tersebut, sebanyak 556 kasus senilai Rp. 310,86 miliar merupakan kategori kerugian.

**(<https://syukriy.wordpress.com>)**

Berdasarkan fenomena di atas dinyatakan bahwa perkembangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2012 sampai dengan 2015 menunjukkan kualitas yang semakin memburuk. Persentase LKPD yang informasi keuangannya tidak dapat diandalkan semakin sedikit. Seperti ketiadaan program yang terpadu dari Pemerintah untuk memperbaiki sistem keuangan negara sesuai dengan paket Tiga Undang-undang Keuangan Negara dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa program yang terpadu dari Pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan rangkaian kegiatan Dialog Publik untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Pada tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa Pemerintah Kota Bandung yang masih bermasalah dalam hal laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Bandung. Penilaian itu menunjukkan bahwa belum ada perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandung sehingga Pemerintah Kota Bandung terus gagal mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Masalah yang paling utama yang dialami oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu masalah pengelolaan asset dimana beberapa asset milik pemerintah kota Bandung belum teradministrasi dengan baik dan juga asset-aset yang statusnya masih tidak jelas. Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), persoalan asset tersebut menyangkut asset tetap yang belum tertib yaitu penyajian asset tetap yang belum didukung dengan daftar rincian, pencatatan ganda, dan penomoran atau

kodefikasi yang belum dilakukan sehingga harus dibentuk pansus penataan asset daerah yang bertugas mendata ulang lebih rinci jumlah asset milik Pemerintah Kota Bandung.

**([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))**

Berdasarkan fenomena di atas, laporan keuangan pemerintah daerah di kota Bandung masih termasuk kategori yang tidak dapat diandalkan karena masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan. Pengelolaan laporan keuangannya pun tidak sesuai yang diharapkan.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan sistem informasi. Disinilah peran aparatur sistem informasi dan pengendalian intern yang memiliki kualitas yang baik untuk mengelola keuangan daerah. (Tuasikal,2007).

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) mencakup adanya (a) perangkat, (b) pengelolaan data keuangan, (c) perawatan (Jurnali dan Supomo dalam Indriasari, 2008).

Dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang baik sehingga laporan keuangan dapat lebih akurat dan laporan keuangan dapat disajikan secara lengkap, serta penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat. Penerapan SIMDA dapat dilihat dari segi kelemahan dalam pengelolaan data keuangan, kelemahan perangkat dan kelemahan dalam perawatan software SIMDA serta masalah

kurangnya pemahaman user ataupun pengguna SIMDA terhadap siklus laporan keuangan pada software SIMDA.

Mahsun dan Sulistiyowati (2012:35) mengemukakan laporan keuangan pemerintah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yakni antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Mulyadi (2001:163) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Mahmudi (2007:27) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansinya di dalamnya mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Warren et all (2005) salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, resiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan

pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (*internal control*).

Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. (<https://andichairulfurqan.wordpress.com>)

Agar laporan keuangan dapat dikategorikan berkualitas, maka dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah harus di dukung oleh penerapan SIMDA agar dapat mempercepat dan memperakurat laporan keuangan pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dari hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang telah dilakukan oleh penulisdahulu yaitu :

1. Sistem informasi dan pengendalian intern yang diteliti oleh (Tuasikal,2007)
2. Kapasitas sumber daya manusia yang diteliti oleh Mustafa, *dkk* (2010)
3. Sistem Pengendalian Intern yang diteliti oleh Arfianti (2011)

4. Pemanfaatan teknologi, pengendalian intern yang diteliti oleh Rosalin (2011)
5. Sistem pengendalian intern dan sumber daya manusia yang diteliti oleh Sukmaningrum (2012)
6. Kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi yang diteliti oleh Hairul Muhammad (2010)
7. Sistem Informasi Manajemen yang diteliti oleh Ridwan (2009)
8. Kompetensi sumber daya manusia yang diteliti oleh Dewi Andini (2013)

**Tabel 1.1**

**Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

No	Peneliti	Tahun	Sistem informasi	Pengendalian Intern	Sumber daya manusia	Pemanfaatan teknologi
1.	Tuasikal	2007	✓	✓	-	-
2.	Mustaffa , dkk	2010	-	-	✓	-
3.	Afrianti	2011	-	✓	-	-
4.	Rosalin	2011	-	-	-	✓
5.	Sukmaningrum	2012	-	✓	✓	-
6.	Hairul Muhammad	2010	✓	-	✓	✓
7.	Ridwan	2009	✓	-	-	-
8.	Dewi Andini	2013	-	-	✓	-

Keterangan :

- ✓ : Mempengaruhi
- : Tidak Meneliti

Dari hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang telah dilakukan oleh penulisdahulu yaitu :



1. Tuasikal (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan sistem informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Disinilah peran aparatur sistem informasi dan pengendalian intern yang memiliki kualitas yang baik untuk mengelola laporan keuangan daerah.
2. Mustafa, *dkk* (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pelaporan keuangan.
3. Arfianti (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.
4. Pada tahun yang sama, Rosalin (2011) memberikan kesimpulan yang konsisten dengan Arfianti (2011) dan Mustafa, *dkk* (2010), dimana Rosalin (2011) menemukan pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan. Pada pengujian kedua didapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap

pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia dan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan.

5. Sukmaningrum (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cipmawanti Mohune (2014) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi pada penelitian sebelumnya, untuk variabel X (Penerapan Sistem Informasi Manajemen daerah) bernilai positif sebesar 0,665. Koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa SIMDA mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada penelitian terlebih dahulu dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo sedangkan penulis meneliti di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Dan penelitian terdahulu tidak menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sedangkan penulis menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraeni S (2014) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut,

bahwa terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas laporannya pun akan semakin berkualitas. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada penelitian terlebih dahulu dilakukan di kabupaten Gorontalo Utara sedangkan penulis meneliti di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Dan penelitian terdahulu tidak menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) sedangkan penulis menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih ditemukannya kelemahan sistem pengendalian intern
2. Adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan Undang-undang yang mengakibatkan kerugian daerah

3. Masih adanya kekurangan penerimaan, kasus administrasi dan ketidakefektifan sehingga BPK masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat diidentifikasi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
2. Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh penerapan SIMDA, penerapan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi. Dan untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengetahui, dan menjelaskan mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
2. Untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
3. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan SIMDA, penerapan SPIP terhadap kualitas keuangan Pemerintah Daerah secara parsial

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi, khususnya pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan akan berguna untuk berbagai pihak diantaranya adalah :

### 1. Bagi Penulis

Dapat menjelaskan mengapa faktor penerapan SIMDA dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Pasundan.

### 2. Bagi Instansi

Untuk memberikan masukan bagi pimpinan perusahaan khususnya mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Diharapkan juga dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan, serta mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

### 3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.